

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini, stunting masih menjadi masalah kesehatan masyarakat pada banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Stunting merupakan suatu kondisi status gizi anak berdasarkan indikator tinggi badan menurut umur (TB/U) atau panjang badan menurut umur (PB/U) berada pada nilai Z score < -2 SD median standar pertumbuhan anak WHO (de Onis and Branca, 2016; WHO, 2021). Anak stunting memiliki tinggi badan atau panjang badan yang kurang jika dibandingkan dengan anak seumurannya.

Secara global, prevalensi stunting pada anak berumur kurang dari lima tahun (balita) di dunia telah mengalami penurunan secara stabil selama dekade terakhir, yaitu dari 26,3 persen pada tahun 2012 menjadi 22,3 persen atau 148,1 juta anak di bawah usia 5 tahun di seluruh dunia yang terkena dampaknya pada tahun 2022. Data ini berarti rata-rata laju penurunan prevalensi stunting sebesar 1,65% pertahun. Rata-rata penurunan ini belumlah cukup untuk mencapai target global dalam mengurangi jumlah anak yang mengalami stunting menjadi 13,5 persen atau 88,9 juta anak pada tahun 2030. Untuk mencapai target global tersebut, diperlukan rata-rata penurunan prevalensi stunting sebesar 6,08 persen per tahun (United Nations Children's Fund (UNICEF), World Health Organization (WHO) and International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, 2023).

Balita stunting masih merupakan masalah kesehatan yang lazim di Indonesia. Berdasarkan hasil Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, prevalensi stunting di Indonesia sejumlah 21,6 persen, turun sebesar 2,8 persen dari tahun 2021 yang berjumlah 24,4 persen. Provinsi Gorontalo merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki prevalensi balita stunting diatas rerata nasional yaitu sejumlah 23,8 persen, turun sebesar 5,2 persen dari tahun sebelumnya yaitu sejumlah 29,0 persen. (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023). Prevalensi stunting di Provinsi Gorontalo dan nasional sama-sama berada pada kisaran medium/ sedang yaitu berada diantara 20-29,9%.

Intervensi-intervensi yang dilakukan untuk penanggulangan stunting di Indonesia telah banyak dilakukan baik melalui program intervensi spesifik maupun intervensi sensitif. Intervensi spesifik yang telah dilakukan diantaranya seperti suplementasi biskuit belut (Herawati *et al.*, 2020), pemberian nugget ayam dengan penambahan daun kelor (Santi *et al.*, 2021), suplementasi telur yang dikombinasikan dengan program fortifikasi multivitamin dan mineral Taburia PLUS (Sudargo *et al.*, 2018), pembuatan formula MP-ASI dengan bahan baku kerang air tawar (Putri *et al.*, 2018). Intervensi Sensitif diantaranya adalah

intervensi pencegahan stunting dengan menyediakan akses terhadap sumber air minum dan pengelolaan limbah padat rumah tangga yang lebih baik (Irianti *et al.*, 2019).

Sebuah tinjauan mengenai penyebab stunting di Indonesia menyebutkan bahwa pemberian ASI tidak eksklusif selama 6 bulan pertama (Yuliastini, Sudiarti and Sartika, 2020), status ekonomi- sosial rumah tangga yang rendah, kelahiran prematur, panjang lahir pendek, dan tinggi badan (Sartika *et al.*, 2021) serta pendidikan ibu yang rendah (Soekatri, Sandjaja and Syauqy, 2020) merupakan faktor penentu stunting anak yang sangat penting di Indonesia. Selain itu, anak-anak yang berasal dari rumah tangga dengan jamban yang tidak layak dan air minum yang tidak diolah, juga berisiko lebih tinggi mengalami stunting (Torlesse *et al.*, 2016). Faktor penentu lainnya adalah akses yang buruk terhadap perawatan kesehatan, dan tinggal di daerah perdesaan (Beal *et al.*, 2018).

Dalam rangka percepatan penurunan stunting di Indonesia, pemerintah menetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia, 2018) yang dikuatkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2021). Pemerintah menetapkan target antara yang harus dicapai sebesar 14% (empat belas persen) pada tahun 2024. Upaya penurunan stunting ini telah dimulai sejak tahun 2011 dengan bergabungnya Indonesia ke dalam gerakan *Global Scaling Up Nutrition* (SUN).

Koordinasi lintas sektor dalam upaya penurunan stunting, umumnya sudah mulai terlihat baik dibawah payung Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting dan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, terlihat dengan sering dilaksanakannya rembuk stunting di semua tingkatan, dari pusat hingga desa, menelaah capaian dan penyelenggaraan program. Kolaborasi multisektoral merupakan hal penting bagi keberhasilan pencapaian tujuan penurunan prevalensi stunting sebagaimana yang telah dilakukan oleh Ethiopia dalam upaya penurunan stunting dalam hal ini memperkuat koordinasi gizi secara multisektoral untuk mengharmonisasikan respon multisektoral dan untuk mobilisasi dan pemanfaatan sumber daya yang efisien (Bach *et al.*, 2020). Dukungan dari mitra pembangunan dan mobilisasi masyarakat di India, terbukti berkontribusi pada perbaikan program untuk kesehatan, kemiskinan, dan sanitasi (Kohli *et al.*, 2020).

Menurut WHO, Kesehatan Masyarakat bukan hanya menjadi tanggungjawab sektor kesehatan. Mengatasi masalah kesehatan membutuhkan

kemauan politik untuk melibatkan seluruh komponen pemerintah yang berkontribusi terhadap kesehatan. Amanah membangun koordinasi lintas sektor untuk mengatasi masalah kesehatan telah disepakati bersama dalam agenda Konferensi Global ke-8 tentang Promosi Kesehatan di Helsinki, Finlandia 10-14 Juni 2013. Dalam konferensi tersebut, salah satu point yang diserukan oleh peserta konferensi kepada negara-negara anggota PBB adalah bahwa pemerintah memperkuat kapasitas Kementerian Kesehatan untuk melibatkan sektor pemerintah lainnya melalui kepemimpinan, kemitraan, advokasi, dan mediasi untuk mencapai kesehatan yang lebih baik (WHO, 2014). Kolaborasi lintas sektor merupakan kemitraan antara organisasi dari berbagai sektor yang bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama menggunakan sumber daya masing-masing (Towe *et al.*, 2016). Kolaborasi lintas sektor yang efektif menciptakan keberlanjutan program, sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan pada sebuah proyek di daerah kumuh perkotaan Old Fadama di Accra, Ghana yang bertujuan untuk menghilangkan wabah kolera. Penelitian tersebut menggunakan penelitian aksi partisipatif (Kritz, 2018).

Koordinasi lintas sektor sejalan dengan tujuan dan misi “Kesehatan Masyarakat 3.0”, yaitu istilah yang digunakan untuk menggambarkan perkembangan atau “modernisasi” tujuan dan misi kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat 3.0 mengacu pada era baru peningkatan dan perluasan praktik kesehatan masyarakat dimana salah satu dari lima tujuannya adalah bahwa Departemen yang mengelola Kesehatan Masyarakat harus terlibat dalam kolaborasi lintas sektor antara departemen kesehatan lainnya, departemen intra pemerintah, dan entitas masyarakat untuk mewujudkan peran tenaga kesehatan sebagai ahli strategi kesehatan masyarakat, tidak hanya sekedar fokus pada penurunan morbiditas dan mortalitas spesifik penyakit (DeSalvo *et al.*, 2017) (Fraser, Castrucci and Harper, 2017). Sebuah studi kualitatif di Amerika Serikat memobilisasi kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan kesehatan penduduk di masyarakat pedesaan. Pada penelitian ini, masyarakat pedesaan menggunakan berbagai bentuk kolaborasi, termasuk kemitraan lintas sektor, interaksi lintas sektor dan eksplorasi lintas sektor, untuk mengatasi masalah kesehatan masyarakat. Namun demikian, kemitraan yang nyata dan langgeng masih jarang terjadi. Strategi praktis dan intervensi kebijakan dapat digunakan untuk meningkatkan kolaborasi lintas sektor di masyarakat (Zhu *et al.*, 2019).

Salah satu bentuk kolaborasi lintas sektor yaitu Model *Accountable Communities of Health* (ACH) atau Komunitas Kesehatan yang Bertanggungjawab. Model ACH ini efektif dalam menstimulasi hubungan yang berkelanjutan diberbagai sektor. Bentuk kolaborasi lintas sektornya yaitu saling berbagi data dan berbagi sumber daya antar sektor. Namun sayangnya salah

satu temuan bahwa momentum dan struktur intervensi ACH tanpa insentif mengalami penyusutan dalam hal mempertahankan kolaborasi setelah tiga tahun hibah. Hal ini juga menegaskan bahwa pendanaan dalam kolaborasi lintas sektor memegang peranan penting (Heeren *et al.*, 2022). Dalam membangun kolaborasi dalam hal kemitraan promosi kesehatan yang efektif, *The Jackson Heart Study* (JHS) menggunakan prinsip-prinsip penelitian partisipatif berbasis komunitas yang melibatkan banyak dimensi. Untuk mengevaluasi kolaborasi yang dibangun, *The Jackson Heart Study* mengembangkan model evaluasi yang dibangun atas lima dimensi yaitu (i) kontak (*contact*); (ii) inisiasi (*initiate*); (iii) penerimaan (*acceptance*); (iv) keberhasilan (*success*); dan (v) keberlanjutan (*continuation*); kelima dimensi ini lebih dikenal dengan akronim CIASC. Kerangka evaluasi CIASC dikembangkan untuk memandu evaluasi kegiatan *the JHS Community Outreach Center (CORA)* yang bergabung dan bermitra dengan kelompok perwakilan masyarakat yang beragam untuk mengatasi kesenjangan dan tingginya prevalensi penyakit kardiovaskular (CVD) (Addison *et al.*, 2015)

Sebuah model instrumen yang digunakan untuk menilai fungsi kemitraan lintas sektor didasarkan pada *Model Bergen* tentang fungsi kolaboratif sebagai kerangka teori. Teori ini menjadi dasar untuk menilai temuan-temuan yang berkaitan dengan proses yang mendukung dan menghambat berfungsinya kemitraan promosi kesehatan. Berdasarkan teori Bergen, terdapat sembilan elemen inti yang membentuk proses kemitraan positif yang dapat menginformasikan praktik-praktik terbaik yaitu (i) mengembangkan misi bersama yang selaras dengan tujuan individu atau kelembagaan mitra; (ii) melibatkan partisipasi yang luas dari berbagai mitra dan keseimbangan sumber daya manusia dan keuangan; (iii) menggabungkan kepemimpinan yang menginspirasi kepercayaan, keyakinan, dan inklusivitas; (iv) memonitor bagaimana komunikasi dipersepsikan oleh mitra dan menyesuaikan diri dengan hal tersebut; (v) menyeimbangkan peran/ struktur formal dan informal tergantung pada misi; (vi) membangun kepercayaan di antara para mitra sejak awal dan selama kemitraan; (vii) memastikan keseimbangan antara kegiatan pemeliharaan dan produksi; (viii) mempertimbangkan dampak dari konteks politik, ekonomi, budaya, sosial, dan organisasi; dan (ix) mengevaluasi kemitraan untuk perbaikan berkelanjutan.

Stunting, merupakan sebuah masalah yang disebabkan oleh multifaktor, sehingga penanganannya pun membutuhkan kerjasama/ koordinasi lintas sektor. Di Indonesia, koordinasi lintas sektor ataupun program kemitraan dalam penanganan stunting merupakan salah satu strategi percepatan perbaikan gizi, tertuang dalam dokumen perencanaan RPJMN 2015-2019 poin ke tujuh yaitu penguatan peran lintas sektor dalam rangka intervensi sensitif dan spesifik yang didukung oleh peningkatan kapasitas pemerintah pusat, provinsi, dan

kabupaten/ kota dalam pelaksanaan rencana aksi pangan dan gizi. Selanjutnya hal ini diperkuat dengan disusunnya Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting (Stranas Stunting) periode 2018 – 2024 yang bertujuan umum mempercepat pencegahan stunting dalam kerangka dan institusi yang ada, dimana didalamnya juga disebutkan meningkatkan pemantauan dan evaluasi sebagai dasar untuk memastikan pemberian layanan yang bermutu, peningkatan akuntabilitas, dan percepatan pembelajaran.

Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024, Provinsi Gorontalo masih menghadapi tantangan serius terkait stunting. Prevalensi balita stunting di Provinsi ini tercatat 23,8%, mengalami penurunan dari 26,9% pada tahun 2023. Meskipun ada progres positif sebesar 3,1 poin persentase, angka ini masih lebih tinggi dibanding prevalensi nasional yang telah mencapai 19,8%. Jika dibandingkan dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, yaitu penurunan stunting menjadi 14,2% pada tahun 2029, maka Gorontalo masih memerlukan percepatan yang signifikan. Kondisi antar kabupaten menunjukkan ketimpangan yang perlu mendapat perhatian: Kabupaten Boalemo dan Pohuwato mencatat prevalensi stunting yang masih tinggi, sementara Kabupaten Gorontalo Utara dan Bone Bolango berada pada level menengah, dan Kota Gorontalo relatif lebih rendah dibanding rata-rata provinsi. Fakta ini mengindikasikan adanya disparitas antarwilayah yang menuntut intervensi yang lebih terfokus dan berbasis konteks lokal. Dengan demikian, percepatan penurunan stunting di Gorontalo membutuhkan strategi terpadu melalui penguatan intervensi spesifik dan sensitif, peningkatan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak, perbaikan gizi keluarga, serta kolaborasi lintas sektor agar target nasional dapat tercapai sesuai RPJMN 2025-2029.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, maka rumusan masalah penelitian dapat dirumuskan sebagaimana berikut:

1. Bagaimana gambaran konseptual dan empiris mengenai praktik kolaborasi lintas sektor dalam percepatan penurunan stunting berdasarkan kajian literatur terkini?
2. Bagaimana merancang pedoman dan instrumen penilaian fungsi kolaborasi lintas sektor yang valid, reliabel, dan komprehensif untuk digunakan dalam evaluasi program percepatan penurunan stunting?

3. Bagaimana membangun aplikasi digital yang mampu memfasilitasi penilaian fungsi kolaborasi lintas sektor penanganan stunting secara praktis, transparan, dan adaptif di tingkat daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengembangkan instrumen evaluasi fungsi kolaborasi lintas sektor dalam percepatan penurunan stunting yang komprehensif, valid, reliabel, dan adaptif, melalui integrasi kajian literatur, perancangan pedoman berbasis kuesioner, serta implementasi aplikasi digital yang dapat digunakan oleh pemangku kepentingan lintas sektor penanganan stunting pada berbagai level pemerintahan

1.3.2. Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi dan menganalisis temuan-temuan ilmiah terkait praktik kolaborasi lintas sektor dalam percepatan penurunan stunting melalui kajian literatur sistematis.
2. Mengembangkan pedoman dan instrumen penilaian fungsi kolaborasi lintas sektor yang disusun secara konseptual dan diuji validitas serta reliabilitasnya untuk mendukung evaluasi program.
3. Merancang aplikasi digital sebagai media inovatif dalam penilaian kolaborasi lintas sektor penanganan stunting

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis, praktis, dan akademik, yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan ilmu kesehatan masyarakat, khususnya dalam ranah kebijakan dan tata kelola lintas sektor. Kajian literatur yang dilakukan memperkuat kerangka teoretis mengenai determinan keberhasilan kolaborasi, sementara pengembangan pedoman penilaian memperkaya landasan evaluatif dengan model input-proses-output yang sistematis. Selain itu, implementasi aplikasi digital SI-KENCANA menghadirkan perspektif baru mengenai integrasi teknologi informasi dalam evaluasi program kesehatan, yang dapat menjadi rujukan bagi penelitian dan

pengembangan teori serupa di masa mendatang.

1.4.2 Manfaat praktis

Penelitian ini memiliki implikasi langsung bagi perbaikan praktik kolaborasi lintas sektor di berbagai level pemerintahan. Pedoman penilaian yang dihasilkan dapat digunakan oleh pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan koordinasi program. Sehingga strategi perbaikan dapat disusun lebih tepat sasaran. Aplikasi SI_KENCANA memfasilitasi penilaian kolaborasi secara praktis, transparan, dan berbasis bukti, sehingga mendukung efisiensi koordinasi dan akuntabilitas program percepatan penurunan stunting. Dengan demikian, penelitian ini memberikan solusi nyata yang dapat diadopsi oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun mitra pembangunan dalam meningkatkan efektivitas program penanganan stunting.

1.4.3 Manfaat akademik

Dari sisi akademik, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan keilmuan dan pendidikan di bidang kesehatan masyarakat, dan kebijakan publik. Pertama, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti dalam mengkaji kolaborasi lintas sektor serta pengembangan instrumen evaluasi program kesehatan. Kedua, hasil penelitian berupa pedoman dan aplikasi digital dapat menjadi model pembelajaran dalam kurikulum pendidikan kesehatan masyarakat, khususnya terkait evaluasi kebijakan berbasis bukti dan pemanfaatan teknologi digital. Ketiga, publikasi hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wacana akademik mengenai pentingnya integrasi pendekatan konseptual, empiris, dan teknologi dalam upaya penyelesaian masalah kesehatan masyarakat yang kompleks seperti stunting.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian yaitu menyusun pedoman dan instrumen penilaian kolaborasi lintas sektor penanganan stunting di Provinsi Gorontalo berdasarkan kerangka Input – Proses – Output, terdiri atas 10 domain yaitu kebutuhan akan lintas sektor penurunan stunting, visi dan misi lintas sektor penurunan stunting, konteks lintas sektor penurunan stunting, profil mitra lintas sektor penurunan stunting, sumberdaya lintas sektor penurunan stunting, kepemimpinan lintas sektor penurunan stunting, peran dan struktur lintas sektor penurunan stunting, komunikasi lintas sektor penurunan stunting, fungsi

kemitraan lintas sektor penurunan stunting, serta kinerja lintas sektor penurunan stunting. Selain itu, instrumen yang tersusun dikembangkan ke dalam aplikasi digital yang dapat digunakan untuk memantau kolaborasi lintas sektor penanganan stunting di Provinsi Gorontalo.

1.6 Kebaruan Penelitian

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan konseptual, metodologis, maupun inovasi praktis yang dihasilkan, sehingga secara keseluruhan memberikan kontribusi signifikan baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun praktik kebijakan penurunan stunting di Indonesia. Dalam konteks penelitian terdahulu, sebagian besar kajian mengenai kolaborasi lintas sektor masih bersifat parsial, menekankan pada aspek tertentu seperti peran kepemimpinan, mekanisme koordinasi, atau ketersediaan sumber daya. Penelitian ini melampaui pendekatan tersebut dengan menghadirkan suatu model evaluasi yang lebih utuh, komprehensif, dan aplikatif.

Pertama, dari sisi konseptual, penelitian ini menghadirkan kerangka Input-Proses-Output (IPO) yang dipadukan secara sistematis untuk menilai fungsi kolaborasi lintas sektor. Model IPO yang digunakan bukan hanya menempatkan input sebagai prasyarat utama, melainkan juga menekankan peran penting proses kolaborasi sebagai mediator yang menentukan efektivitas output. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya literatur mengenai collaborative governance, yang selama ini masih terbatas pada uraian konseptual tanpa instrumen evaluasi operasional yang terstandar. Kebaruan konseptual ini sekaligus mengisi kesenjangan antara teori dan praktik, terutama dalam konteks percepatan penurunan stunting yang menuntut koordinasi multipihak.

Kedua, kebaruan metodologis terlihat dari penggunaan pendekatan mixed methods yang menggabungkan kajian kualitatif dan kuantitatif secara berlapis. Tahap kualitatif melalui wawancara mendalam dan focus group discussion (FGD) berhasil menggali indikator fungsi kolaborasi berdasarkan pengalaman aktor lintas sektor di tingkat lokal. Selanjutnya, tahap kuantitatif digunakan untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen, sehingga instrumen yang dihasilkan tidak hanya relevan secara kontekstual, tetapi juga memiliki landasan empiris yang kuat. Dari total 95 item yang dikembangkan, 93 item dinyatakan valid (97,9%) dengan tingkat reliabilitas sangat tinggi (rata-rata Cronbach's Alpha = 0,876). Hal ini menunjukkan bahwa instrumen yang dihasilkan memiliki konsistensi internal yang baik dan dapat diandalkan untuk digunakan dalam berbagai konteks daerah.

Ketiga, penelitian ini melahirkan indikator operasional yang komprehensif mencakup 18 domain fungsi kolaborasi lintas sektor. Setiap domain tidak hanya menilai dimensi struktural, seperti ketersediaan regulasi dan sumber daya, tetapi juga dimensi dinamis, seperti kualitas komunikasi, mekanisme koordinasi, kepercayaan antar-aktor, dan proses pengambilan keputusan kolektif. Dengan demikian, instrumen ini menawarkan perspektif evaluatif yang lebih menyeluruh dibanding penelitian terdahulu yang umumnya hanya berfokus pada aspek tertentu. Kebaruan ini penting karena kompleksitas penurunan stunting tidak dapat diatasi dengan melihat satu aspek saja, melainkan harus dipahami melalui interaksi multidimensional antar-aktor, antar-proses, dan antar-level pemerintahan.

Keempat, kebaruan yang menonjol sekaligus membedakan penelitian ini dari studi serupa adalah adanya inovasi praktis berupa aplikasi digital SI-KENCANA (Sistem Kolaborasi Penilaian Cegah Anak Stunting). Aplikasi ini berfungsi ganda: sebagai instrumen evaluasi yang memudahkan pengukuran fungsi kolaborasi lintas sektor secara real-time, sekaligus sebagai pedoman operasional yang dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola program percepatan penurunan stunting. Integrasi teknologi digital ke dalam instrumen evaluasi menjadikan penelitian ini relevan dengan perkembangan era digital governance, serta memfasilitasi transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam proses monitoring.

Secara keseluruhan, kebaruan penelitian ini dapat dirangkum ke dalam tiga dimensi utama. Pertama, inovasi metodologis, berupa pengembangan instrumen berbasis IPO dengan validitas dan reliabilitas tinggi, serta integrasi metode kualitatif dan kuantitatif. Kedua, kontribusi teoretis, berupa pengayaan konsep collaborative governance dengan indikator operasional yang komprehensif, sehingga memperkuat basis teori sekaligus memfasilitasi analisis empiris lintas konteks. Ketiga, kontribusi praktis, berupa lahirnya aplikasi digital SI-KENCANA yang dapat digunakan secara luas untuk menilai, memantau, dan meningkatkan fungsi kolaborasi lintas sektor dalam percepatan penurunan stunting di berbagai daerah.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan sumbangan nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang kesehatan masyarakat dan kebijakan publik, tetapi juga menawarkan solusi inovatif yang aplikatif untuk menjawab tantangan lapangan. Kebaruan penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan baru bagi akademisi, praktisi, maupun pembuat kebijakan dalam merancang strategi kolaborasi lintas sektor yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan dalam upaya percepatan penurunan stunting di Indonesia.

1.7 Desain Konseptual

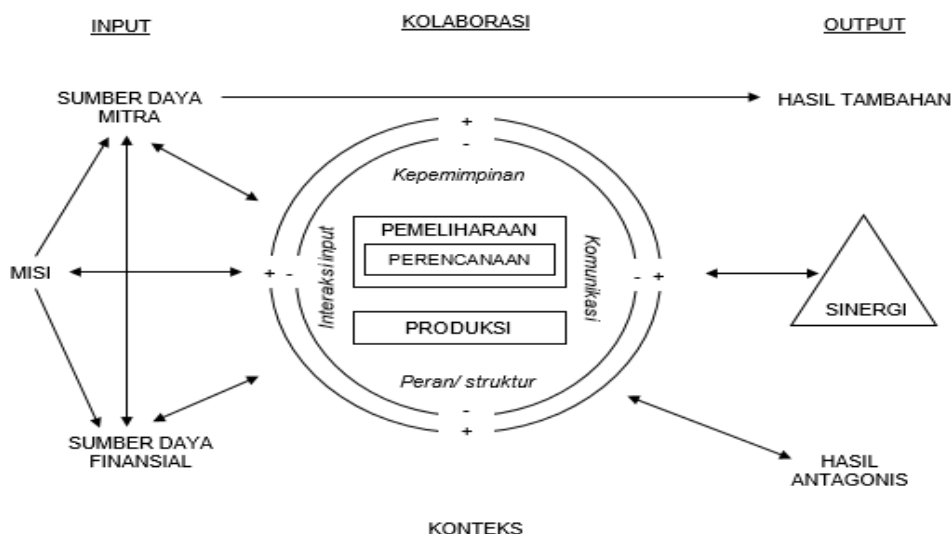
1.7.1 Kerangka Teori

Sebuah model instrumen yang digunakan untuk menilai fungsi kemitraan lintas sektor didasarkan pada Model Bergen tentang fungsi kolaboratif sebagai kerangka teori. Teori ini menjadi dasar untuk menilai temuan-temuan yang berkaitan dengan proses yang mendukung dan menghambat berfungsinya kemitraan promosi kesehatan. Berdasarkan teori Bergen, terdapat sembilan elemen inti yang membentuk proses kemitraan positif yang dapat menginformasikan praktik-praktik terbaik yaitu (i) mengembangkan misi bersama yang selaras dengan tujuan individu atau kelembagaan mitra; (ii) melibatkan partisipasi yang luas dari berbagai mitra dan keseimbangan sumber daya manusia dan keuangan; (iii) menggabungkan kepemimpinan yang menginspirasi kepercayaan, keyakinan, dan inklusivitas; (iv) memonitor bagaimana komunikasi dipersepsikan oleh mitra dan menyesuaikan diri dengan hal tersebut; (v) menyeimbangkan peran/ struktur formal dan informal tergantung pada misi; (vi) membangun kepercayaan di antara para mitra sejak awal dan selama kemitraan; (vii) memastikan keseimbangan antara kegiatan pemeliharaan dan produksi; (viii) mempertimbangkan dampak dari konteks politik, ekonomi, budaya, sosial, dan organisasi; dan (ix) mengevaluasi kemitraan untuk perbaikan berkelanjutan (Hope Corbin, Jones and Barry, 2018).

Model Bergen tentang fungsi kolaboratif adalah sebuah model teoritis yang telah teruji secara empiris di sejumlah inisiatif promosi kesehatan yang beragam, sebagai kerangka analisis untuk menilai kinerja kolaboratif, sebagai panduan untuk praktik dan sebagai alat evaluasi (Hope Corbin, Jones and Barry, 2018). Berdasarkan pemikiran sistem, model ini menggambarkan fungsi dalam hal input, proses, maupun output. Model Bergen, menyajikan kerangka kerja dari 15 domain kemitraan untuk kolaborasi lintas sektor yang efektif. Masukan meliputi misi, sumberdaya mitra, dan sumber daya keuangan. Ketika input masuk ke dalam kolaborasi, input tersebut berinteraksi dengan berbagai elemen proses kolaborasi seperti praktik kepemimpinan, komunikasi, peran dan prosedur formal, dan interaksi satu sama lain (misalnya hubungan kekuasaan, kepercayaan, keseimbangan (bantuan pendanaan/kemitraan). Keluaran dari kemitraan adalah hasil aditif (orang melakukan apa yang akan mereka lakukan), sinergisme dan antagonisme, dan memberi umpan balik ke dalam kolaborasi, yang mempengaruhi proses fungsi baik secara negatif maupun positif. Tinjauan literatur internasional tentang proses yang efektif untuk kerjasama kemitraan menegaskan pentingnya domain-domain yang diuraikan dalam Model Bergen tentang Fungsi Kolaboratif dan menjadi dasar pemilihan domain dan item untuk

dimasukkan ke dalam matriks yang digunakan untuk memetakan domain dari alat bantu yang dipilih.

Kerangka teoritis penelitian berdasarkan Model Fungsi Kolaboratif Bergen/ (*The Bergen Model of Collaborative Functioning/ BMFC*) dapat digambarkan sebagai berikut:



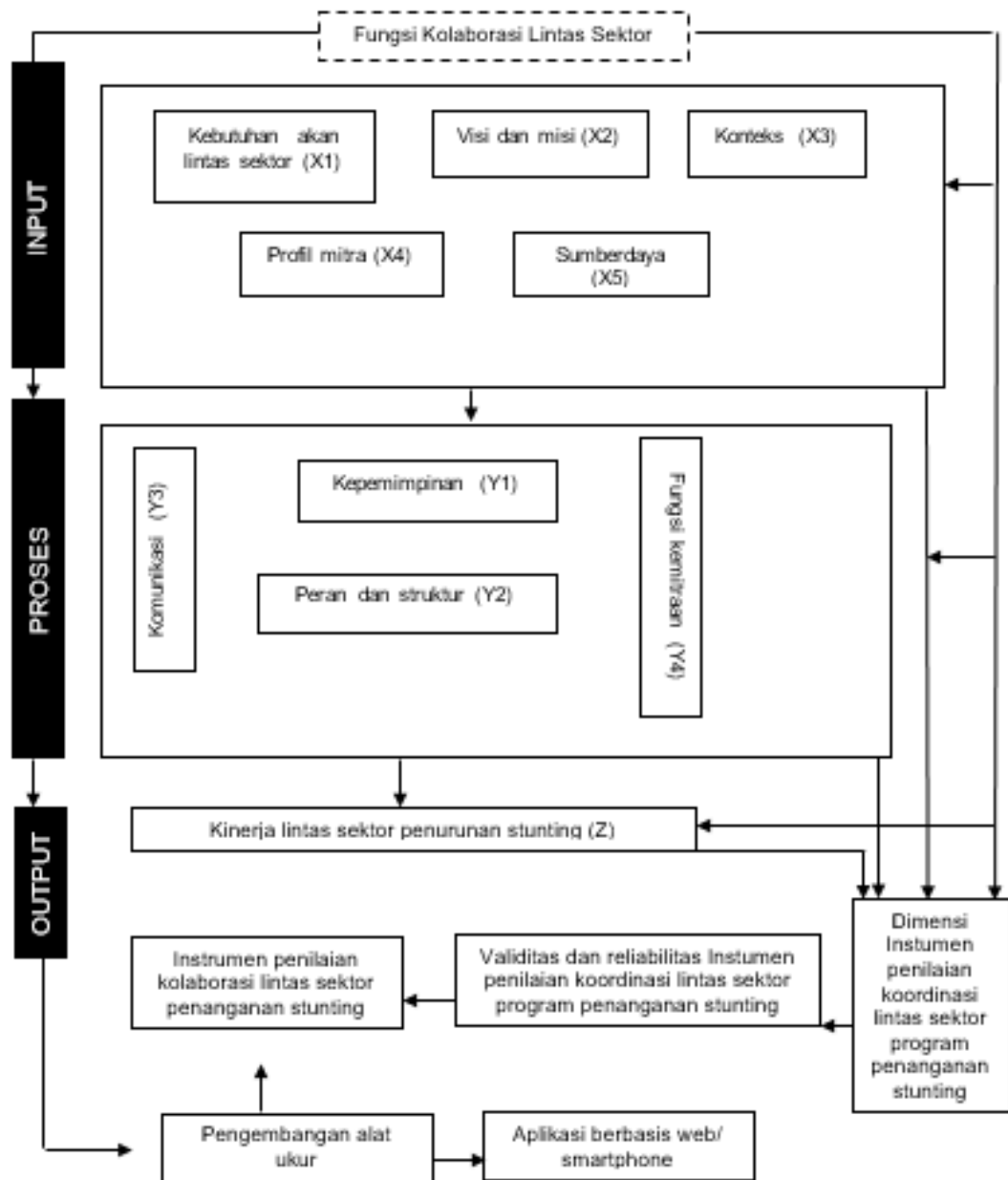
Gambar 1 Kerangka Teoritis *The Bergen Model of Collaborative Functioning*

Kerangka teoritis *The Bergen Model of Collaborative Functioning (BMCF)* yang ditampilkan pada Gambar 1 memberikan dasar analitis untuk memahami bagaimana kolaborasi lintas sektor bekerja dalam konteks percepatan penurunan stunting. Model ini menegaskan bahwa efektivitas kolaborasi sangat dipengaruhi oleh kualitas hubungan antara input, proses kolaboratif (throughput), dan output/outcome, yang pada akhirnya dapat menghasilkan sinergi, hasil aditif, atau bahkan antagonisme. Namun, dalam konteks penelitian ini, kerangka BMCF tidak hanya digunakan sebagai alat konseptual untuk memahami dinamika kolaborasi, melainkan juga diadaptasi dan dikembangkan lebih lanjut menjadi desain konseptual penelitian yang lebih operasional. Adaptasi ini diwujudkan dalam bentuk model Input - Proses - Output (IPO) sebagai kerangka kerja praktis yang memungkinkan perumusan indikator penilaian fungsi kolaborasi secara lebih sistematis. Dengan kata lain, BMCF menjadi pijakan teoritis, sementara IPO Model berfungsi sebagai kerangka konseptual yang memandu operasionalisasi penelitian.

Penggunaan IPO Model dalam penelitian ini juga bertujuan untuk menyederhanakan kompleksitas dinamika kolaborasi yang digambarkan oleh

BMCF. Jika BMCF menekankan interaksi non-linear dan kemungkinan munculnya hasil antagonistik, maka IPO Model digunakan untuk menstrukturkan alur penelitian dalam tiga domain utama: input (sumber daya, mandat, komitmen, regulasi), proses (komunikasi, koordinasi, kepemimpinan, kepercayaan), dan output (hasil kebijakan, efektivitas program, keberlanjutan intervensi stunting). Integrasi kedua kerangka ini memungkinkan penelitian ini menggabungkan kedalaman analisis BMCF dengan keterukuran IPO Model, sehingga menghasilkan instrumen penilaian yang tidak hanya valid secara konseptual tetapi juga aplikatif di lapangan. Dengan demikian, desain konseptual penelitian yang akan dipaparkan pada sub-bab 1.7.2 merupakan elaborasi dari BMCF yang diterjemahkan ke dalam model IPO. Desain ini memuat indikator-indikator terpilih yang dikembangkan melalui studi literatur, wawancara mendalam, *focus group discussion*, serta uji validitas dan reliabilitas instrumen. Melalui desain konseptual ini, penelitian diharapkan dapat menjembatani kesenjangan antara teori collaborative governance dan praktik kolaborasi lintas sektor dalam percepatan penurunan stunting di Indonesia.

1.7.2 Kerangka Konsep



Gambar 2 Kerangka Konsep Penelitian

Kerangka konsep penelitian ini disusun berdasarkan adaptasi dari *The Bergen Model of Collaborative Functioning (BMCF)* yang kemudian diterjemahkan ke dalam model Input - Proses - Output (IPO). Pemilihan kerangka

ini dimaksudkan untuk menyederhanakan kompleksitas dinamika kolaborasi lintas sektor sebagaimana dijelaskan dalam BMCF, sekaligus memberikan struktur yang lebih operasional dalam perumusan indikator penelitian. Dengan demikian, kerangka konsep yang digunakan dalam penelitian ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif dalam menjawab kebutuhan evaluasi kolaborasi lintas sektor di lapangan. Kerangka konsep ini menempatkan Input sebagai fondasi awal yang mencakup ketersediaan regulasi, komitmen aktor, dukungan sumber daya manusia, finansial, serta legitimasi mandat kebijakan. Komponen input dipandang sebagai prasyarat yang harus terpenuhi agar kolaborasi dapat berjalan dengan baik.

Selanjutnya, Proses berperan sebagai jantung dari kolaborasi, mencakup aspek komunikasi, koordinasi, kepemimpinan, kepercayaan (*trust*), dan mekanisme manajemen konflik. Proses ini menekankan pentingnya kualitas interaksi antar-aktor dalam menentukan efektivitas kolaborasi. Proses yang sehat dan berkesinambungan akan memungkinkan transformasi input menjadi hasil kolaborasi yang optimal. Komponen terakhir, yaitu Output, mencerminkan hasil yang dicapai dari kolaborasi lintas sektor. Dalam penelitian ini, output didefinisikan sebagai efektivitas kebijakan dan program percepatan penurunan stunting, peningkatan sinergi lintas sektor, serta keberlanjutan intervensi. Berbeda dengan BMCF yang menekankan kemungkinan keluaran berupa hasil aditif, sinergis, maupun antagonistik, kerangka konsep penelitian ini lebih diarahkan pada pencapaian hasil sinergis yang berkontribusi pada percepatan penurunan stunting.

Kerangka konsep yang divisualisasikan dalam Gambar 2, menunjukkan adanya hubungan konseptual antara teori BMCF dan IPO Model. BMCF memberikan kerangka berpikir yang komprehensif mengenai dinamika kolaborasi, sedangkan IPO Model menyajikan struktur yang lebih sederhana untuk operasionalisasi indikator penelitian. Dengan memadukan kedua model tersebut, penelitian ini mampu menghasilkan instrumen penilaian fungsi kolaborasi lintas sektor yang tidak hanya valid secara konseptual, tetapi juga aplikatif dalam praktik kebijakan publik.

Oleh karena itu, kerangka konsep penelitian ini berfungsi sebagai panduan utama dalam:

1. Mengidentifikasi indikator fungsi kolaborasi lintas sektor melalui studi literatur dan data empiris.
2. Mengklasifikasikan indikator ke dalam domain input, proses, dan output untuk memudahkan evaluasi.
3. Menghubungkan indikator dengan hasil akhir berupa efektivitas

kolaborasi lintas sektor dalam penurunan stunting.

Dengan kerangka ini, penelitian diharapkan dapat menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik, serta menghasilkan pedoman evaluasi kolaborasi lintas sektor yang komprehensif, terukur, dan berorientasi pada perbaikan kebijakan percepatan penurunan stunting di Indonesia.

1.8 Daftar Pustaka

- Addison, C. C. *et al.* (2015) 'Building collaborative health promotion partnerships: The Jackson heart study', *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 13(1). doi: 10.3390/ijerph13010025.
- Bach, A. *et al.* (2020) 'Multisectoral Integration of Nutrition, Health, and Agriculture: Implementation Lessons From Ethiopia', *Food and Nutrition Bulletin*, 41(2), pp. 275–292. doi: 10.1177/0379572119895097.
- Beal, T. *et al.* (2018) 'A review of child stunting determinants in Indonesia', *Maternal and Child Nutrition*, 14(4), pp. 1–10. doi: 10.1111/mcn.12617.
- DeSalvo, K. B. *et al.* (2017) 'Public health 3.0: A call to action for public health to meet the challenges of the 21st century', *Preventing Chronic Disease*, 14(9), pp. 1–9. doi: 10.5888/pcd14.170017.
- Fraser, M., Castrucci, B. and Harper, E. (2017) 'Public Health Leadership and Management in the Era of Public Health 3.0', *Journal of Public Health Management and Practice*, 23(1), pp. 90–92. doi: 10.1097/PHH.0000000000000527.
- Heeren, T. *et al.* (2022) 'Applying network analysis to assess the development and sustainability of multi-sector coalitions', *PLoS ONE*, 17(10 October), pp. 1–15. doi: 10.1371/journal.pone.0276114.
- Herawati, D. M. D. *et al.* (2020) 'Effect of Eel Biscuit Supplementation on Height of Children with Stunting Aged 36-60 Months: A Pilot Study', *Journal of Nutrition and Metabolism*, 2020. doi: 10.1155/2020/2984728.
- Hope Corbin, J., Jones, J. and Barry, M. M. (2018) 'What makes intersectoral partnerships for health promotion work? A review of the international literature', *Health Promotion International*, 33(1), pp. 4–26. doi: 10.1093/heapro/daw061.
- Irianti, S. *et al.* (2019) 'The role of drinking water source, sanitation, and solid waste management in reducing childhood stunting in Indonesia', *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 344(1), pp. 1–10. doi: 10.1088/1755-1315/344/1/012009.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2023) 'Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022', *Kemendes RI*. Jakarta: Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia,

pp. 1–54. Available at:
<https://kesmas.kemkes.go.id/assets/uploads/contents/attachments/09fb5b8ccfd088080f2521ff0b4374f.pdf>.

- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia (2021) 'Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting'. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Available at: <https://cegahstunting.id/unduh/regulasi/>.
- Kohli, N. *et al.* (2020) 'The role of the state government, civil society and programmes across sectors in stunting reduction in Chhattisgarh, India, 2006–2016', *BMJ Global Health*, 5(7), pp. 2006–2016. doi: 10.1136/bmjgh-2019-002274.
- Kritz, J. (2018) 'Effective cross-sector collaborations create sustainability', *The Lancet Global Health*, 6(9), pp. e952–e953. doi: 10.1016/S2214-109X(18)30299-7.
- de Onis, M. and Branca, F. (2016) 'Childhood stunting: A global perspective', *Maternal and Child Nutrition*, 12, pp. 12–26. doi: 10.1111/mcn.12231.
- Putri, S. R. *et al.* (2018) 'Freshwater Clams (*Pilsbryconcha Exilis*) as an Potential Local Mineral Sources in Weaning Food to Overcome Stunting in Grobogan, Central Java, Indonesia', *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 116(1). doi: 10.1088/1755-1315/116/1/012077.
- Santi, M. W. *et al.* (2021) 'Moringa chicken nugget as supplementary food for toddler to prevent stunting', *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 672(1), pp. 1–7. doi: 10.1088/1755-1315/672/1/012065.
- Sartika, A. N. *et al.* (2021) 'Prenatal and postnatal determinants of stunting at age 0–11 months: A cross-sectional study in Indonesia', *PLoS ONE*, 16(7 July), pp. 1–15. doi: 10.1371/journal.pone.0254662.
- Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia (2018) 'Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting) periode 2018-2024'. Jakarta: Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia.
- Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia (2019) *Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting) Periode 2018-2024*. Edisi Kedu. Jakarta: Sekretariat Percepatan Pencegahan Stunting, Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia. Available at: https://stunting.go.id/wp-content/uploads/2020/08/Stranas_Percepatan_Pencegahan_Anak_Kerdil.pdf.
- Soekatri, M. Y. E., Sandjaja, S. and Syauqy, A. (2020) 'Stunting was associated with reported morbidity, parental education and socioeconomic status in 0.5–12-year-old Indonesian children', *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(17), pp. 1–9. doi: 10.3390/ijerph17176204.

- Sudargo, T. *et al.* (2018) 'The effect of additional egg supplementation on vitamin and mineral fortification program on growth, cognitive development and hemoglobin in Indonesian underweight and stunting children', *Nutrition and Food Science*, 48(5), pp. 744–754. doi: 10.1108/NFS-01-2018-0009.
- Torlesse, H. *et al.* (2016) 'Determinants of stunting in Indonesian children: evidence from a cross-sectional survey indicate a prominent role for the water, sanitation and hygiene sector in stunting reduction', *BMC Public Health*, 16, pp. 1–11. doi: 10.1186/s12889-016-3339-8.
- Towe, V. L. *et al.* (2016) 'Cross-sector collaborations and partnerships: Essential ingredients to help shape health and well-being', *Health Affairs*, 35(11), pp. 1964–1969. doi: 10.1377/hlthaff.2016.0604.
- United Nations Children's Fund (UNICEF), World Health Organization (WHO) and International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank (2023) 'Levels and trends in child malnutrition: UNICEF / WHO / World Bank Group Joint Child Malnutrition Estimates: Key findings of the 2023 edition', *Asia-Pacific Population Journal*. New York: UNICEF and WHO. Available at: <https://data.unicef.org/resources/jme-report-2023/>.
- WHO (2014) 'Health in all policies: Helsinki statement. Framework for country action', *8th Global Conference on Health Promotion*, p. 21.
- WHO (2021) *Stunting, wasting, overweight and underweight*. Available at: <https://apps.who.int/nutrition/landscape/help.aspx?menu=0&helpid=391&lang=EN> (Accessed: 26 August 2021).
- Yuliastini, S., Sudiarti, T. and Sartika, R. A. D. (2020) 'Factors related to stunting among children age 6-59 months in babakan madang sub-district, West Java, Indonesia', *Current Research in Nutrition and Food Science*, 8(2), pp. 454–461. doi: 10.12944/CRNFSJ.8.2.10.
- Zhu, X. *et al.* (2019) 'Mobilising cross-sector collaborations to improve population health in US rural communities: A qualitative study', *BMJ Open*, 9(11). doi: 10.1136/bmjopen-2019-030983.

BAB II. TOPIK PENELITIAN 1

KOLABORASI LINTAS SEKTOR DALAM PENANGANAN STUNTING DI INDONESIA: SEBUAH TINJAUAN LITERATUR

2.1 Abstrak

MISRAWATIE GOI: *Kolaborasi Lintas Sektor dalam Penanganan Stunting di Indonesia: Sebuah Tinjauan Literatur* (Dibimbing oleh: A. Ummu Salmah, Nurhaedar Jafar, Amil Ahmad Ilham)

Latar Belakang. Stunting masih menjadi masalah gizi kronis di Indonesia yang berdampak pada kualitas sumber daya manusia di masa depan. Upaya percepatan penurunan stunting memerlukan intervensi spesifik dan sensitif yang tidak hanya ditangani sektor kesehatan, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Namun berbagai studi menunjukkan bahwa efektivitas kolaborasi antaraktor masih bervariasi, sehingga perlu dipahami faktor pendukung maupun hambatan dalam implementasinya. **Tujuan.** Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor kunci yang memengaruhi keberhasilan kolaborasi lintas sektor dalam penanganan stunting di Indonesia. **Metode.** Metode Penelitian menggunakan tinjauan literatur sistematis dengan pencarian artikel pada basis *Science Direct* dan *Google Scholar* selama periode 2019-2024. Sebanyak 26 artikel memenuhi kriteria inklusi setelah melalui tahap penyaringan. **Hasil.** Hasil kajian menunjukkan bahwa faktor pendukung kolaborasi meliputi komitmen bersama, koordinasi efektif, dukungan regulasi, serta partisipasi aktif pemangku kepentingan melalui pendekatan *pentahelix*. Sebaliknya, hambatan utama ditemukan pada keterbatasan sumber daya, dominasi aktor nonpemerintah. Model tata kelola kolaboratif yang menekankan keterlibatan berprinsip, motivasi bersama, dan kapasitas aksi, terbukti relevan untuk memperkuat efektivitas intervensi. **Kesimpulan.** Disimpulkan bahwa percepatan penurunan stunting membutuhkan tata kelola kolaboratif yang konsisten, partisipatif, dan berbasis bukti. Temuan ini dapat menjadi landasan bagi perumusan strategi dan kebijakan lintas sektor yang efektif dalam mengatasi stunting di Indonesia.

Kata Kunci: Stunting, Kolaborasi Lintas Sektor, Tata Kelola Kolaboratif, Indonesia.

2.2 Pendahuluan

Stunting merupakan kondisi pertumbuhan anak yang tidak sesuai dengan usianya atau pertumbuhannya lebih pendek dibandingkan anak seusianya dan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Stunting pada anak dapat terjadi

pada 1000 hari pertama setelah pembuahan dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain status sosial ekonomi, asupan makanan, kesehatan gizi ibu, penyakit infeksi, defisiensi mikronutrien, dan kondisi lingkungan. Akar penyebab terjadinya stunting antara lain terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan yang memadai, kondisi ekonomi keluarga yang buruk, dan gabungan faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang memengaruhi lingkungan sekitar. Semua faktor tersebut saling berinteraksi dan berkontribusi terhadap terjadinya stunting pada anak usia dini (Black *et al.*, no date; Svefors *et al.*, 2020; Mashar, Suhartono and Budiono, 2021).

Di Indonesia, stunting merupakan masalah kesehatan masyarakat yang signifikan. Prevalensi stunting (tinggi badan menurut umur) di Indonesia pada tahun 2021 sebesar 24,4% dan pada tahun 2022 sebesar 21,6%. Data ini masih melebihi target WHO terkait prevalensi stunting yaitu sebesar 20% (*Global nutrition targets 2025: stunting policy brief*, no date; Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, no date). Kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya penanggulangan stunting di Indonesia masih belum efektif dan stunting masih menjadi masalah yang krusial sehingga memerlukan prioritas pemerintah (Maulana, Silitonga and Asropi, 2023). Dampak jangka pendeknya antara lain menurunnya daya tahan tubuh, meningkatnya kerentanan terhadap berbagai penyakit, serta tingginya angka kesakitan dan kematian. Dampak jangka panjang dari penanganan stunting yang tidak memadai, jika tidak segera ditangani, antara lain: 1) Berkurangnya perkembangan kognitif pada otak anak; 2) Melemahnya sistem kekebalan tubuh yang menyebabkan kerentanan terhadap penyakit; 3) Meningkatnya risiko masalah metabolisme seperti obesitas; 4) Penyakit jantung; 5) Penyakit pembuluh darah; dan 6) Kesulitan belajar (Saputri and Tumangger, 2019; Sahroji, Hidayat and Nababan, 2022).

Pemerintah Indonesia telah berupaya mencegah stunting melalui pendekatan lintas sektor, baik vertikal maupun horizontal. Secara vertikal, hal ini melibatkan sinkronisasi kebijakan dari pemerintah pusat hingga ke tingkat desa. Sementara itu, secara horizontal, setiap jenjang pemerintahan berkoordinasi lintas bidang. Pemerintah daerah di tingkat kabupaten/ kota memegang peranan penting dalam merumuskan kebijakan, program, dan pembiayaan terkait intervensi pencegahan stunting (Ulfah and Nugroho, 2020).

Untuk meningkatkan intervensi gizi yang tepat sasaran, sangat penting untuk mencapai konvergensi, koordinasi, dan kolaborasi lintas berbagai program, sektor, inisiatif pemberdayaan masyarakat, dan bidang terkait. Upaya terpadu ini bertujuan untuk mempercepat penurunan angka stunting di Indonesia. Oleh karena itu, peta jalan untuk menurunkan angka stunting pada anak secara menyeluruh meliputi: beberapa langkah terkait diagnostik,

konsultasi pemangku kepentingan, dan implementasi intervensi gizi langsung dan tidak langsung terkait sektor kesehatan dan sektor nonkesehatan (Sahroji, Hidayat and Nababan, 2022).

Kolaborasi lintas sektor merupakan bentuk kolaborasi yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga sosial dan keagamaan, akademisi, media massa, dan seluruh masyarakat. Pendekatan ini dapat dimulai dengan menyelaraskan persepsi tentang stunting, menumbuhkan komitmen, dan bekerja sama lintas pemangku kepentingan untuk mengurangi stunting, sekaligus meningkatkan kesadaran di antara individu dan masyarakat. Kolaborasi lintas sektor merupakan strategi aksi publik yang diakui baik untuk mengatasi masalah masyarakat yang kompleks atau untuk mencapai perubahan sistemik. Kolaborasi lintas sektor terbukti efektif dalam menciptakan keberlanjutan sehingga program yang dijalankan bergerak menuju kemajuan yang sesuai (Dentoni, Bitzer and Schouten, 2018; Seaton *et al.*, 2018; Van Tulder and Keen, 2018; Kurniasih *et al.*, 2022).

Komunikasi merupakan landasan utama kolaborasi. Pemerintah, sebagai peserta utama, harus mengembangkan ide dan kerangka kerja yang memotivasi semua pihak yang terlibat untuk memulai inisiatif strategis. Selain itu, penyediaan sumber daya dan memastikan transparansi publik sangat penting untuk membangun kepercayaan di antara para pemangku kepentingan. Namun, dukungan yang tidak memadai dan kecenderungan pemerintah terhadap sentralisasi dan dominasi sumber daya menimbulkan hambatan bagi kolaborasi yang efektif. Mencapai kolaborasi yang sukses memerlukan sudut pandang bersama, apresiasi terhadap inovasi, dan meminimalkan ketergantungan pada pemangku kepentingan eksternal untuk sumber daya (Saufi, 2021).

Dalam membangun keakraban dalam kolaborasi, komunikasi memegang peranan penting. Proses dialog ditekankan sebagai hal yang krusial untuk menumbuhkan saling pengertian di antara para pelaku, yang mendukung munculnya ide-ide program yang inovatif. Proses kolaborasi diawali dengan dialog sehingga semua pihak memiliki legitimasi dan mekanisme akuntabilitas yang terbuka (Innes and Booher, 2000). Untuk mengatasi masalah stunting, diperlukan upaya yang komprehensif dan kolaboratif yang melibatkan berbagai sektor. Upaya ini mencakup intervensi spesifik dan sensitif berdasarkan bukti, melibatkan pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah (Arso *et al.*, 2023).

2.3 Metode Penelitian

Pencarian sistematis mencakup dua basis data elektronik dari 1 Januari 2019 hingga 29 Februari 2024, yaitu *Science Direct* dan *Google Scholar*. Pencarian mengikuti prosedur berikut: Istilah Judul Subjek, kata kunci teks, dan *Operator Boolean*, sebagai berikut; (1) kolaborasi ATAU koordinasi; (3) penanganan ATAU pengurangan; (4) stunting. Catatan disimpan di *Mendeley Reference Manager* dan duplikat dihapus. Setelah menghapus duplikat, catatan disaring berdasarkan judul artikel dan abstrak. Akhirnya, artikel teks lengkap yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi diperiksa.

Pencarian studi dalam basis data elektronik berhasil mengidentifikasi 287 artikel. Dari jumlah tersebut, 3 duplikat dihilangkan dan 258 artikel dihilangkan karena judul, jenis artikel, dan hasil yang diinginkan tidak terkait. Oleh karena itu, 26 artikel sesuai dengan kriteria inklusi dan dimasukkan dalam tinjauan ini.



Gambar 3 Diagram Alir Pemilihan Studi

2.4 Hasil dan Pembahasan

2.4.1 Hasil Penelitian

Tabel 2.1 menunjukkan temuan beberapa studi yang relevan mengenai Kolaborasi Lintas Sektor dalam Penanganan Stunting di Indonesia. Terdapat 26 studi yang tersebar di wilayah Indonesia yaitu Riau, Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur.

Tabel 1. Studi Relevan mengenai Kolaborasi Lintas Sektor dalam Penanganan Stunting di Indonesia

No	Author (Tahun)	Tempat	Hasil Studi
1	Nurhaeni, <i>et al</i> (2021) (Nurhaeni <i>et al.</i> , 2021)	Jakarta	Penanganan stunting dalam bentuk kolaborasi Perawat, Dokter, dan Kader Kesehatan sangat berdampak terhadap anak-anak penderita stunting, terutama di masa pandemi Covid-19
2	Ipan, <i>et al</i> (2021) (Ipan, Purnamasari and Priyanti, 2023)	Karawang, Jawa Barat	Proses kolaborasi dilakukan melalui dialog tatap muka, membangun kepercayaan antar pemangku kepentingan, menumbuhkan komitmen antar pemangku kepentingan, dan berbagi pemahaman bersama antar pemangku kepentingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kolaborasi dalam penanganan stunting sudah cukup efektif. Hal ini dibuktikan dengan adanya keterlibatan pihak swasta dan masyarakat.
3	Ali Imron, <i>et al</i> (2022) (Imron <i>et al.</i> , 2022a)	Nganjuk, Jawa Timur	Efektivitas peran sosial dalam tata kelola kolaboratif untuk mempercepat penanggulangan stunting di Kabupaten Nganjuk. Pemerintah desa berperan penting dalam merumuskan kebijakan anggaran untuk mendukung program-program tersebut, sementara bidan desa dan penyuluh keluarga berencana bekerja sama untuk merancang program yang efektif. Dukungan berkelanjutan diberikan kepada keluarga yang terdampak stunting melalui keterlibatan aktif bidan dan Tim Dukungan Keluarga.
4	Fernandes, <i>et al</i> (2022) (Fernandes, Daud Niga and	Flores Timur	Dialog internal tatap muka dan dialog terbuka dengan pihak terkait merupakan hal yang strategis dalam penanganan stunting. Perlu

No	Author (Tahun)	Tempat	Hasil Studi
	Seran Klau, (2022)		adanya peningkatan intensitas membangun kepercayaan antar pemangku kepentingan. Komitmen terhadap proses kolaborasi dalam Satgas Konvergensi Penanganan Stunting cukup kuat. Telah terbentuk pemahaman bersama mengenai penanganan stunting secara komprehensif. Hasil sementara yang diperoleh dapat menjadi sumber motivasi dan dasar bagi langkah selanjutnya dalam Satgas.
5	Permatasari and Walinegoro (2023) (Ane Permatasari and Walinegoro, 2023)	Sleman, Jawa Tengah	Kolaborasi ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari pemerintah, sektor swasta, akademisi, media, dan masyarakat. Selain itu, implementasi kolaborasi juga ditujukan untuk mewujudkan tiga dimensi masyarakat cerdas, yaitu interaksi masyarakat, ekosistem pembelajaran, dan sistem keamanan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah dapat mengupayakan program-program inovatif dengan mengandalkan kemampuan berbagai pihak untuk berkolaborasi dalam upaya penurunan angka stunting.
6	Erison (2024) (Erison, 2024)	Batang, Jawa Tengah	Kolaborasi dilakukan dengan menggunakan model pentahelix atau yang dikenal dengan konsep ABCGM, yang meliputi Akademisi, Bisnis, Komunitas, Pemerintah, dan Media. Perguruan Tinggi di Kabupaten Batang terlihat masih terbatasnya peran dalam menanggulangi maraknya kasus stunting. Kolaborasi ABCGM dalam penanganan kasus stunting di Kabupaten Batang belum optimal. Hal ini dikarenakan sinergi masing-

No	Author (Tahun)	Tempat	Hasil Studi
			masing aktor sangat terbatas sehingga koordinasi komunikasi belum terbangun dengan baik. Penanganan kasus stunting di Kabupaten Batang didominasi oleh peran sentral Pemerintah Kabupaten Batang sendiri. Keterlibatan aktor nonpemerintah masih terbatas.
7	Tiyas Tinov, <i>et al</i> (2023) (Erison, 2024)	Mandau, Riau	Faktor pendukung tercapainya penurunan stunting di Kabupaten Mandau antara lain adalah adanya koordinasi antar pemangku kepentingan, diikuti dengan adanya rasa saling percaya antar peserta yang terlibat dan komitmen terhadap tujuan bersama, sehingga diperlukan penguatan aspek kesadaran pemangku kepentingan dalam menjalani tata kelola kolaboratif, serta dorongan internal kelembagaan dan masyarakat (masyarakat sipil) juga perlu terus dijaga agar tercapai zero stunting di Kabupaten Bengkalis khususnya di Kecamatan Mandau.
8	Nasution and Trimurni (2024) (Nasution and Trimurni, 2024)	Medan	Kolaborasi pemerintah dalam program penanggulangan stunting di Kota Medan melibatkan komunikasi langsung untuk koordinasi. Dalam program ini, seluruh instansi pemerintah di Kota Medan menyelenggarakan forum terbuka, yaitu forum Forkopimda dan 8 forum Aksi Konvergensi Stunting. Kepercayaan antar instansi pemerintah telah terjalin, terbukti dengan terus berjalannya pelaksanaan program dan forum koordinasi. Dengan adanya saling pengertian, para pembuat kebijakan dapat mencapai keberhasilan dalam proses

No	Author (Tahun)	Tempat	Hasil Studi
			kolaboratif untuk mengatasi masalah stunting.
9	Sulaiman, <i>et al</i> (2022) (Sulaiman <i>et al.</i> , 2022)	Tangerang Selatan	Dalam kerja sama antara mahasiswa dengan posyandu di Sawah Baru, Ciputat, Kota Tangerang Selatan, pelaksanaannya berjalan sesuai rencana, atau dapat dikatakan optimal. Melalui dialog tatap muka antara berbagai pihak, kepercayaan di antara mereka semakin meningkat, sehingga terjalin kerja sama yang efektif. Kepercayaan yang terjalin tersebut mendorong masyarakat untuk mengikuti penyuluhan kesehatan di posyandu Sawah Baru, Ciputat, Kota Tangerang Selatan secara rutin.
10	Yunifar, <i>et al</i> (2023) (Yunifar, Kusbandrijo and Puspaningtyas, 2023)	Surabaya	Kolaborasi antara Pemerintah, Sektor Swasta, Media Massa, LSM, dan Akademisi telah berjalan efektif. Komunikasi di antara mereka telah terjalin dengan baik, dan upaya kolaboratif telah menghasilkan dampak positif karena prevalensi stunting terus menurun dari tahun ke tahun.
11	Ulfah and Nugroho (2020) (Ulfah and Nugroho, 2020)	Jember, Jawa Timur	Berdasarkan penjabaran kebijakan, program, dan kegiatan di atas, Pemerintah Kabupaten Jember telah melakukan kolaborasi antara kebijakan nasional dengan kebijakan daerah. Artinya, Pemerintah Kabupaten Jember telah melaksanakan kebijakan penanggulangan stunting dari pemerintah pusat/ kebijakan nasional yang diikuti dengan kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Jember sendiri. Dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut, diperlukan

No	Author (Tahun)	Tempat	Hasil Studi
			kolaborasi antar instansi pemerintah, tidak hanya Dinas Kesehatan tetapi juga instansi terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Urusan Desa.
12	Saipul Hamdi, <i>et al</i> (2023) (Hamdi <i>et al.</i> , 2023)	Bilebante, Lombok Tengah	Penyusunan kebijakan dan penguatan modal sosial oleh Pemerintah Desa Bilebante dapat mempercepat pembangunan di berbagai bidang. Sikap kolaboratif masyarakat dan peran aktif berbagai pemangku kepentingan telah mengantarkan Desa Bilebante berhasil menurunkan angka stunting secara signifikan dalam kurun waktu tiga tahun program.
13	Afandi, <i>et al</i> (2023) (Afandi <i>et al.</i> , 2022)	Jawa Barat	Kolaborasi yang diamanatkan telah dilaksanakan, tetapi dengan partisipasi terbatas dari aktor non-negara. Situasi ini muncul karena lembaga pemerintah masih mendominasi proses tersebut, sementara aktor non-pemerintah tidak sepenuhnya terlibat. Akibatnya, kolaborasi dalam intervensi stunting menjadi program pemerintah semata, bukan proses yang dimiliki bersama.
14	Arso (2023) (Arso <i>et al.</i> , 2023)	Semarang, Jawa Tengah	Pencegahan stunting pada balita memerlukan intervensi gizi yang spesifik dan sensitif. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dan kolaborasi multipihak, seperti dari Puskesmas, Kader Kesehatan, PKK, Keluarga Berencana, Kecamatan, Desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pengelola PAUD. Hal ini meliputi penguatan peran dan pelaksanaan Posyandu balita, penguatan peran dan pelaksanaan UKS, penguatan

No	Author (Tahun)	Tempat	Hasil Studi
			peran dan pelaksanaan posyandu remaja, penguatan peran dan pelaksanaan kelas antenatal dan postnatal, peningkatan penyediaan sanitasi, penanggulangan kemiskinan, pendidikan kesetaraan gender, dan penguatan Komunikasi Perubahan Perilaku (KPP) untuk percepatan penurunan stunting.
15	Muhammad Farhan Waliyudin, <i>et al</i> (2022) (Waliyudin, Ningsih and Susanti, 2022)	Kuningan, Jawa Barat	Penanganan stunting di Kabupaten Kuningan melibatkan upaya koordinasi, namun beberapa tantangan masih ada. Tantangan tersebut meliputi pembagian tugas yang tidak jelas, seringkali terjadi pergantian anggota tim, tidak adanya prosedur operasi standar (SOP) yang terdokumentasi, pengelolaan data stunting yang kurang optimal, terbatasnya partisipasi dalam rapat koordinasi, dan kepemimpinan tim yang tidak efektif. Meskipun demikian, keterlibatan aktif pemerintah desa, sektor swasta, dan masyarakat tetap penting dalam membentuk kebijakan dan program yang efektif untuk menanggulangi stunting.
16	Jasmine Azzahra Maharani Suratman, <i>et al</i> (2023) (Suratman, Damayanti and Azzahla, 2023)	Gresik, Jawa Timur	Dalam pelaksanaan pencegahan stunting terungkap adanya kolaborasi aktif yang melibatkan berbagai sektor, meliputi tenaga kesehatan, petugas lapangan keluarga berencana, tim TP-PKK, PPKBD, dan/atau kader kesehatan masyarakat. Pelaksanaan upaya kolaboratif lintas profesi dan sektor dalam intervensi prioritas yang ditujukan untuk mengurangi stunting dibentuk oleh kerjasama, keterampilan komunikasi yang efektif, pemberdayaan, dan kondisi sumber daya manusia yang ada.

No	Author (Tahun)	Tempat	Hasil Studi
17	Qotrun Nada Sahroji (2022) (Sahroji, Hidayat and Nababan, 2022)	Karawang, Jawa Barat	Pelaksanaan kebijakan kesehatan untuk mengatasi stunting di Kabupaten Karawang dapat dikatakan belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain program yang belum terlaksana dan belum memberikan dampak langsung kepada masyarakat setempat. Kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan masih kurang memadai, serta dukungan atau partisipasi masyarakat terhadap upaya pemerintah masih kurang. Selain itu, kesadaran masyarakat Karawang terhadap pentingnya hidup sehat seperti kesehatan lingkungan, kesehatan reproduksi, dan gizi yang baik masih kurang dalam konteks pencegahan stunting.
18	Ilham Wilya Putra (2024) (Putra and Helmi, 2024)	Pasaman Barat, Sumatera Barat	Dinas Kesehatan menunjukkan komitmen kuat dalam menanggulangi stunting dengan aktif berkolaborasi dengan instansi pemerintah daerah seperti DISKOMINFO dan PPKB P3a. Penerapan saluran komunikasi digital oleh Dinas Kesehatan merupakan bentuk adaptasi terhadap kemajuan teknologi, sehingga meningkatkan efisiensi dan kecepatan dalam menanggulangi stunting. Kolaborasi antara Dinas Kesehatan dengan instansi pemerintah daerah, disertai pemanfaatan teknologi komunikasi, merupakan langkah positif dalam menanggulangi pencegahan stunting di Kabupaten Pasaman Barat.

No	Author (Tahun)	Tempat	Hasil Studi
19	Putri Widiyana Maharani (2023)	Pemalang, Jawa Tengah	Pelaksanaan program penanggulangan stunting, seperti program pemberian makanan tambahan, dukungan pemberian ASI, dan peningkatan suplementasi zat besi bagi ibu hamil di Kabupaten Pemalang, telah dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah daerah bekerja sama dengan dinas kesehatan. Setiap desa juga telah berupaya untuk mengoordinasikan program penanggulangan stunting, yang hasilnya memuaskan. Intervensi dinas kesehatan terutama difokuskan pada perawatan khusus, mulai dari remaja putri hingga pengasuhan dan tumbuh kembang anak. Sementara itu, intervensi sensitif dilakukan oleh dinas lintas sektor.
20	Aspar Abdul Gani (2021) (Gani <i>et al.</i> , 2021)	Banggai, Sulawesi Tengah	Upaya pencegahan stunting di Kabupaten Banggai dilakukan melalui pendekatan kolaboratif. Hal ini terlihat dari keterlibatan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor, baik pemerintah maupun swasta, serta perguruan tinggi. Keterlibatan mereka meliputi perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program penanggulangan stunting. Pemerintah daerah menunjukkan komitmen yang kuat dengan menerbitkan peraturan dan kebijakan untuk mendukung inisiatif tersebut. Selain itu, pembentukan Tim Tugas 1000 Hari Pertama Kehidupan memfasilitasi koordinasi dan integrasi program yang difokuskan pada periode kritis awal kehidupan, yang sejalan dengan rencana aksi pencegahan dan penanggulangan stunting di Kabupaten Banggai. Aksi

No	Author (Tahun)	Tempat	Hasil Studi
			konvergensi selama satu tahun intervensi mengurangi stunting secara signifikan pada anak usia 0–11 bulan tetapi tidak pada kategori usia balita lainnya.
21	Widyowati and Utomo (2023)(Widyowati and Utomo, 2023)	Wonogiri, Jawa Tengah	Kolaborasi digagas Pemerintah Kabupaten Wonogiri sesuai dengan amanat atau regulasi terkait percepatan penanggulangan stunting. Tim Percepatan Penanggulangan Stunting (TPPS) dibentuk dengan melibatkan pemangku kepentingan baik dari sektor pemerintah maupun nonpemerintah secara terorganisasi. Proses kolaborasi tersebut meliputi dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan pencapaian hasil. Hasil dari kolaborasi ini antara lain meningkatnya semangat gotong royong dan gotong royong dalam menangani permasalahan publik. Selain itu, berbagai program dan kegiatan penanggulangan stunting berjalan lancar sehingga menghasilkan intervensi yang spesifik dan sensitif bagi masyarakat. Hal ini diiringi dengan meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat terkait penanggulangan stunting.
22	Candarmaweni and Rahayu (Candarmaweni and Rahayu, 2020)	Pandeglang, Jawa Barat	Para pimpinan daerah Kabupaten Pandeglang sangat menyadari bahwa penanganan stunting harus menggunakan metode kolaboratif agar dapat ditangani secara efektif dan efisien. Dalam Rembug Stunting, Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda Kabupaten Pandeglang mengatakan semua

No	Author (Tahun)	Tempat	Hasil Studi
			aktor yang terlibat dalam menganalisis situasi di Pandeglang, khususnya pada lokus yang telah ditentukan. Motivasi bersama terdiri dari membangun kepercayaan, menciptakan saling pengertian, legitimasi internal, dan komitmen. Kepercayaan bersama ini dapat dibangun antara OPD, OPD, dan aktor nonpemerintah, serta OPD dan masyarakat nonpemerintah.
23	Jufri, <i>et al</i> (2023) (Jufri, Usman and Nofriadi, 2023)	Gayo Lues, Aceh	Tata kelola kolaboratif dalam penanggulangan stunting di Kabupaten Gayo Lues meliputi: dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan hasil antara. Faktor pendorong dan kendala dalam penanggulangan stunting adalah keterlibatan penuh pemerintah desa dan fasilitator dalam penanggulangan stunting, yang meningkatkan moral masyarakat, keterbatasan dana, dan kelalaian masyarakat.
24	Andayani <i>et al.</i> (2022) (Afandi <i>et al.</i> , 2022)	Sumenep, Madura	Model kolaborasi penta-helix Desa Emas melibatkan pemerintah, sektor swasta, akademisi, masyarakat, dan media massa dengan komitmen yang lebih kuat untuk mengurangi stunting. Dukungan kolaborasi difasilitasi dengan menyelaraskan kebijakan dan kondisi lokal dengan pemerintah pusat. Selain itu, kabupaten diharapkan memberikan arahan dan bantuan dalam melaksanakan intervensi gizi prioritas terpadu di tingkat kabupaten dan desa.
25	Saufi (2021) (Saufi, 2021)	Jawa Barat	Kolaborasi melibatkan beberapa aktor, termasuk pemerintah, universitas, sektor swasta, dan

No	Author (Tahun)	Tempat	Hasil Studi
			organisasi masyarakat. Tantangan dalam proses kolaborasi antara lain kolaborasi yang terbatas pada komitmen tanpa penjelasan antar aktor, kewajiban hukum yang lemah terkait peran sektor swasta, akomodasi yang tidak memadai antara sektor swasta, media, organisasi masyarakat, dan universitas, serta kurangnya transparansi informasi. Faktor keberhasilan program ini antara lain penempatan agenda pemetaan potensi sumber daya berdasarkan data, kebutuhan intervensi, dan partisipasi publik oleh pemerintah.
26	Febriana and Hertati (2023)	Probolinggo, Jawa Timur	Dalam proses kolaborasi ini melibatkan pemerintah daerah, organisasi Aisyiyah, kader KB, dan masyarakat. Terdapat lima tahapan dalam kolaborasi tersebut, yaitu: dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses kolaborasi, pemahaman bersama, dan hasil antara. Persoalan dalam proses kolaborasi adalah kurangnya intensitas dialog tatap muka antar pemangku kepentingan.

2.4.2 Pembahasan

Penanggulangan stunting telah menjadi program prioritas nasional yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 dengan target penurunan sebesar 14% pada tahun 2024. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah penyusunan strategi nasional penanggulangan stunting sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penanggulangan Stunting. Kebijakan ini merupakan strategi konvergensi yang menyatukan berbagai program lintas jenjang pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama. Upaya kolaboratif penanggulangan stunting melibatkan seluruh pemangku

kepentingan, baik pemerintah, swasta, akademisi, maupun masyarakat mulai dari tingkat pusat hingga tingkat desa. Adanya kebijakan ini diharapkan dapat memfasilitasi aksi bersama dan alokasi sumber daya, sehingga pelaksanaan program penanggulangan stunting dapat berjalan efektif dan efisien (Maulana, Silitonga and Asropi, 2023). Penanggulangan stunting di pedesaan menjadi prioritas di tingkat nasional. Sasarannya pada periode 2020-2024 adalah memastikan seluruh desa di kabupaten dan kota prioritas terbebas dari stunting. Strategi yang dilakukan antara lain memperkuat komitmen pimpinan pemerintahan desa, mendorong koordinasi lintas sektor, dan mengoptimalkan pemanfaatan dana desa untuk pencegahan stunting. Upaya tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menekan prevalensi stunting di Indonesia (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia, 2018). Komunikasi antar organisasi pelaksana difasilitasi melalui koordinasi. Koordinasi merupakan proses fundamental dalam kebijakan publik, dan dapat dicapai melalui beberapa mekanisme, termasuk jaringan, kolaborasi, dan hierarki (Peters, 2018).

Peneliti memvalidasi temuan data dengan menerapkan model tata kelola kolaboratif Emerson. Model ini mencakup tiga dimensi penting; 1) Keterlibatan Berprinsip: Dimensi ini menekankan pentingnya melibatkan pemangku kepentingan berdasarkan prinsip, nilai, dan norma bersama. Model ini mendorong dialog terbuka, saling menghormati, dan komitmen terhadap tujuan bersama; 2) Motivasi Bersama: Upaya kolaboratif akan berkembang pesat ketika semua pihak memiliki motivasi yang kuat untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Rasa tujuan kolektif mendorong kolaborasi dan mempertahankan momentum; 3) Kapasitas untuk Aksi Bersama: Kolaborasi yang sukses membutuhkan kemampuan untuk menerjemahkan niat bersama menjadi tindakan konkret. Membangun kapasitas—baik dalam hal sumber daya maupun keterampilan, memungkinkan upaya bersama yang efektif (Emerson, Nabatchi and Balogh, 2012).

Pemerintah sebagai aktor utama dinilai memiliki kapasitas yang kuat dalam mengelola dinamika dan berhasil menjalankan peran kolaboratifnya sesuai dengan prinsip-prinsipnya. Lemahnya kolaborasi muncul akibat kurangnya dialog yang intensif antar pemangku kepentingan. Setiap pemangku kepentingan memiliki perspektif yang terbatas dalam unit kerjanya masing-masing, padahal pencegahan stunting merupakan isu yang kompleks dan membutuhkan sumber daya yang besar (Saufi, 2021). Program percepatan penanggulangan stunting di tingkat pusat dikoordinasikan melalui Tim Percepatan Penanggulangan Stunting yang terdiri dari para pengarah dan pelaksana. Pengarah nasional Tim Percepatan Penanggulangan Stunting

dipimpin langsung oleh Wakil Presiden, sedangkan tim pelaksana diketuai oleh Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Tim percepatan penanggulangan stunting juga dibentuk di tingkat provinsi dan desa yang bertugas mengoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi upaya penanggulangan stunting di wilayah masing-masing. Di tingkat desa, koordinasi melibatkan tenaga kesehatan, penyuluh keluarga berencana, satuan tugas pemberdayaan kesejahteraan keluarga, pendamping keluarga berencana desa (PPKBD), kader pemberdayaan manusia, dan perwakilan masyarakat lainnya (Maulana, Silitonga and Asropi, 2023).

Dalam kolaborasi, tahapan dialog harus diarahkan lebih efektif dan substantif. Legitimasi sangat penting untuk membangun hubungan yang harmonis dan saling percaya di antara para pemangku kepentingan. Proses dan struktur kerja sama lintas sektor harus efisien. Struktur yang terbuka dan tidak egosentris akan menghasilkan tata kelola yang kolaboratif dan memfasilitasi implementasi kesepakatan di antara para pemangku kepentingan. Pemerintah harus kolaboratif dan mematuhi prinsip-prinsip dalam kinerja kolaboratif, yaitu budaya, kepemimpinan, visi strategis, proses tim, dan struktur (Innes and Booher, 2000; Bryson, Crosby and Stone, 2015; Muhammad, 2017).

Dalam konteks pembuatan kebijakan kolaboratif, sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan substansi tahap dialog. Dialog-dialog ini berfungsi sebagai platform penting untuk melibatkan para pemangku kepentingan, menyelaraskan perspektif, dan mendorong konsensus dalam menangani isu-isu kompleks seperti pencegahan stunting. Keterlibatan setiap pemangku kepentingan menghadirkan beragam sumber daya dan perspektif. Pemerintah daerah, sebagai peserta aktif dalam proses kolaborasi, harus mengutamakan keterbukaan kepada masyarakat dan menumbuhkan rasa saling percaya. Memulai musyawarah tentang stunting memungkinkan terjadinya pertukaran ide dan memfasilitasi komunikasi publik. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ini ke dalam perencanaan dan tindakan program, komitmen dan kepercayaan dapat tumbuh subur di antara para pemangku kepentingan yang berkolaborasi (Saufi, 2021).

a. Faktor Pendukung

Kolaborasi lintas sektor adalah kolaborasi yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat secara keseluruhan (Bryson, Crosby and Stone, 2006). Kolaborasi yang sukses bergantung pada dua faktor penting. Pertama, ketersediaan sumber daya, pengetahuan, dan dukungan finansial yang memadai sangat penting. Kedua, pemangku kepentingan harus memiliki keyakinan yang sama. Kedua faktor ini saling bergantung dan tidak dapat dipisahkan atau

didominasi secara independen. Kepemimpinan yang kuat dalam program implementasi untuk mencapai target nasional menjadi salah satu alasan mengapa Pandeglang berhasil menangani stunting (Candarmaweni and Yayuk Sri Rahayu, 2020). Indikator keberhasilan kolaborasi ditentukan oleh adanya prinsip-prinsip dasar. Prinsip-prinsip tersebut meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efisiensi, efektivitas, dan konsensus yang saling menguntungkan. Keterlibatan aktif para pelaku dalam kolaborasi sangat penting, karena mereka harus mengambil inisiatif untuk mendorong tindakan. Tiga aspek penting kolaborasi: pelaku, komitmen, dan keterbukaan (Lima, 2021).

Penurunan angka stunting dapat dipercepat melalui fungsi belanja kesehatan nasional dan daerah (Hanifa Muslimah and Subhandi Bakhtiar, 2021). Alokasi dana desa dinilai memiliki dampak positif terhadap penanggulangan stunting, sehingga diperlukan berbagai intervensi untuk meningkatkan kontribusinya terhadap penanggulangan stunting nasional. Desa memiliki karakteristik yang unik, baik dari segi struktur sosial maupun dinamika tata kelola. Berdasarkan beberapa penelitian, terdapat berbagai tantangan dalam melaksanakan program penanggulangan stunting di desa, antara lain budaya dan kepercayaan masyarakat, tingkat partisipasi masyarakat, serta kapasitas kepemimpinan perangkat desa dan pengurus dalam menginisiasi program (Prabasari, Lubis and Sutiari, 2021; Indra and Khoirunurrofik, 2022; Aminullah and Riris Setiyo Rini, 2023).

Motivasi bersama mencakup pembentukan kepercayaan, menumbuhkan saling pengertian, legitimasi internal, dan komitmen. Proses keterlibatan berputar di sekitar membangun kepercayaan. Untuk memperluas transmisi kepercayaan, upaya bersama harus dilakukan untuk melibatkan semua pemangku kepentingan secara efektif. Kepercayaan bersama ini dapat dipupuk di antara Badan Perencanaan Pembangunan, Badan Pemerintah (OPD), aktor non-pemerintah, dan dalam masyarakat yang mereka layani. Oleh karena itu, inisiasi upaya membangun kepercayaan tidak hanya jatuh pada pemerintah tetapi meluas ke pemangku kepentingan lainnya juga. Upaya pemerintah untuk menumbuhkan kepercayaan termasuk melakukan pertemuan pemantauan di tingkat OPD dan kabupaten, memberikan pelatihan bagi masyarakat, dan menyebarkan program stunting melalui media elektronik. Sebaliknya, sektor swasta dianggap lebih terorganisasi dalam upaya membangun kepercayaan, berkontribusi melalui sesi konseling dan program pelatihan ekstensif untuk pekerja dan pendidik kesehatan (Candarmaweni and Yayuk Sri Rahayu, 2020).

b. Hambatan

Proses perencanaan di Bidang Kesehatan menunjukkan adanya keterbatasan yang signifikan dalam hal informasi keuangan, termasuk sumber dana, pemanfaatan, dan penerima manfaat. Dalam pembangunan kesehatan, perencanaan berfungsi sebagai fungsi manajerial utama karena memegang peranan penting dalam membangun landasan untuk mengawasi dan mengarahkan tujuan yang ingin dicapai. Hasil dari rencana tersebut adalah dokumen komprehensif yang menguraikan secara tepat bagaimana tujuan yang ditetapkan akan dicapai, meliputi alokasi sumber daya, jadwal, dan langkah-langkah lain yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Kurangnya koordinasi antar lembaga yang membuat program berjalan secara independen, dan juga kurangnya transparansi dalam dana bantuan, sehingga sulit untuk menentukan anggaran mana yang akan digunakan (Frongillo, 1999).

Kurangnya dukungan dan kontrol pemerintah yang terpusat dan dominan terhadap alokasi sumber daya menghambat kolaborasi yang efektif. Pemerintah, sebagai aktor, dianggap memiliki kapasitas yang kuat dalam mengelola dinamika dan berhasil memenuhi peran kolaboratifnya sesuai prinsip-prinsipnya. Namun, kolaborasi melemah karena kurangnya dialog intensif di antara para pemangku kepentingan. Setiap pemangku kepentingan memiliki perspektif yang terbatas dalam unit masing-masing, meskipun pencegahan stunting merupakan masalah yang sangat kompleks yang membutuhkan sumber daya yang besar (Saufi, 2021). Kapasitas pemerintah desa dalam membangun jaringan eksternal untuk menanggulangi stunting di desa masih kurang, sehingga perlu dilakukan peningkatan kapasitas pemerintah desa (Candarmaweni and Yayuk Sri Rahayu, 2020).

Berbagai upaya telah dilakukan seperti melakukan edukasi, membentuk forum sosialisasi, memberikan pendampingan, publikasi, dan pembaharuan program bagi masyarakat. Namun, hingga saat ini kendala dan tantangan yang ditemukan dalam penelitian ini bersumber dari kurangnya kepercayaan masyarakat (Nasution and Trimurni, 2024). Tantangan yang dihadapi antara lain terbatasnya pengetahuan dan perilaku orang tua dalam mengasuh anak. Tantangan yang dihadapi adalah banyaknya pihak yang memiliki visi yang sama dalam mengatasi stunting tidak dilibatkan, sehingga berjalan sendiri-sendiri. Hal ini menyebabkan upaya yang dilakukan kurang efektif, efisien, dan tidak terpadu (Imron *et al.*, 2022b; A Permatasari and Walinegoro, 2023). Dengan melibatkan banyak instansi tentu saja akan menimbulkan kompleksitas dalam pelaksanaan program sehingga menimbulkan ego lintas sektor dengan menyesuaikan program yang telah menjadi arahan program instansi tersebut sehingga program

menjadi kurang optimal karena bentuk koordinasinya dilakukan secara terpisah-pisah (Utomo, Khaerani and Anzalna, 2023).

2.5 Kesimpulan dan Perspekti Masa Depan

Memerangi stunting memerlukan pendekatan holistik yang mencakup intervensi yang terarah, kolaborasi lintas sektor, dan kebijakan serta program yang dirancang dengan baik. Upaya ini meliputi pendidikan bagi orang tua, promosi pemberian ASI, memastikan sanitasi dan kebersihan yang baik, serta mengatasi kesenjangan sosial ekonomi..

Untuk mencapai tujuan penghapusan stunting secara menyeluruh, pemerintah harus melakukan serangkaian kemajuan atau peningkatan, termasuk menilai peran pemangku kepentingan, memperluas jaringan kolaborasi, melakukan inovasi dalam taktik implementasi program, dan menciptakan saluran komunikasi khusus yang berfokus pada stunting di wilayah setempat.

Penguatan implementasi tata kelola kolaboratif memerlukan persepsi bersama dan motivasi yang kuat di antara para pelaku sosial, serta peningkatan kapasitas untuk tindakan bersama guna mencapai tujuan bersama. Tata kelola kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan merupakan kunci keberhasilan implementasi.

2.6 Daftar Pustaka

- Afandi, M. N. *et al.* (2022) 'A Penta-Helix Approach to Collaborative Governance of Stunting Intervention In West Java Indonesia', *Proceedings of the Third International Conference Administration Science*. Bandung, Indonesia: Proceedings of the Third International Conference Administration Science, ICAS 2021. doi: 10.4108/eai.15-9-2021.2315238.
- Aminullah and Riris Setiyo Rini (2023) 'Efektivitas Pelaksanaan Program Advokasi Kebijakan Stunting Di Dinas P3Ap2Kb Kabupaten Pasuruan', *Journal Publicuho*, 6(2), pp. 649–657. doi: 10.35817/publicuho.v6i2.182.
- Arso, S. P. *et al.* (2023) 'Penguatan Peran Lintas Sektor dalam Percepatan Penurunan Stunting di Wilayah Kerja Puskesmas Tlogosari Kulon', *Jurnal Pegabdian West Science*, 02(08), pp. 624–632.
- Black, R. E. *et al.* (no date) 'Maternal and Child Undernutrition 1 Maternal and child undernutrition: global and regional exposures and health consequences', *www.thelancet.com*, p. 243. doi: 10.1016/S0140.

- Bryson, J. M., Crosby, B. C. and Stone, M. M. (2006) 'The design and implementation of cross-sector collaborations: Propositions from the literature', *Public Administration Review*, 66(SUPPL. 1), pp. 44–55. doi: 10.1111/j.1540-6210.2006.00665.x.
- Bryson, J. M., Crosby, B. C. and Stone, M. M. (2015) 'Designing and Implementing Cross-Sector Collaborations: Needed and Challenging', *Public Administration Review*, 75, pp. 647–663. doi: 10.1111/puar.12432.Designing.
- Candarmaweni and Rahayu, A. Y. S. (2020) 'Tantangan Pencegahan Stunting Pada Era Adaptasi Baru "New Normal" Melalui Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Pandeglang', *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI*, 9(3), pp. 136–146. Available at: <https://journal.ugm.ac.id/jkki/article/view/57781>.
- Candarmaweni and Yayuk Sri Rahayu, A. (2020) 'Collaborative governance to achieve SDGs social development: Preventing stunting lesson from Pandeglang', *E3S Web of Conferences*, 211, pp. 1–10. doi: 10.1051/e3sconf/202021101014.
- Dentoni, D., Bitzer, V. and Schouten, G. (2018) 'Harnessing Wicked Problems in Multi-stakeholder Partnerships', *Journal of Business Ethics*, pp. 333–356. doi: 10.1007/s10551-018-3858-6.
- Emerson, K., Nabatchi, T. and Balogh, S. (2012) 'An integrative framework for collaborative governance', *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), pp. 1–29. doi: 10.1093/jopart/mur011.
- Erison, Y. (2024) 'ABCGM-BASED STUNTING PREVENTION GOVERNANCE IN BATANG DISTRICT', *Indonesian Journal of Social Sciences, Policy, and Politics*, 2(1), pp. 26–33. Available at: <https://ijsspp.yayasanwayanmarwanpulangan.com/ojs/index.php/IJSSPP%0AABCGM-BASED>.
- Fernandes, D., Daud Niga, J. and Seran Klau, R. (2022) 'Collaborative Governance In The Handling of Stunting Program In East Flores District', *Devotion Journal of Community Service*, 3(14), pp. 2611–2624. doi: 10.36418/dev.v3i14.317.
- Frongillo, E. A. (1999) 'Symposium: Causes and Etiology of Stunting', *The Journal of Nutrition*, 129(2), pp. 529S–530S. doi: 10.1093/jn/129.2.529s.
- Gani, A. A. et al. (2021) 'The effect of convergent action on reducing stunting prevalence in under-five children in Banggai District, Central Sulawesi, Indonesia', *Gaceta Sanitaria*, 35, pp. S421–S424. doi: 10.1016/j.gaceta.2021.10.066.
- Global nutrition targets 2025: stunting policy brief* (no date). Available at: <https://www.who.int/publications/i/item/WHO-NMH-NHD-14.3> (Accessed: 19 March 2024).

- Hamdi, S. *et al.* (2023) 'Pengembangan Model Penanganan Stunting Di Ntb: Studi Kebijakan Di Desa Bilebante, Lombok Tengah', *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 18(2), pp. 209–234. doi: 10.47441/jkp.v18i2.346.
- Hanifa Muslimah, R. and Subhandi Bakhtiar, H. (2021) 'Bekasi City Government Policy In Financing Stunting In Children', *KESANS : International Journal of Health and Science*, 1(2), pp. 131–138. doi: 10.54543/kesans.v1i2.10.
- Imron, A. *et al.* (2022a) 'Sinergi Lintas Sektor Dalam Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur', *Media Gizi Indonesia*, 17(1SP), pp. 239–243. doi: 10.20473/mgi.v17i1sp.239-243.
- Imron, A. *et al.* (2022b) 'Sinergi Lintas Sektor Dalam Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur', *Media Gizi Indonesia*, pp. 239–243. doi: 10.20473/mgi.v17i1sp.239-243.
- Indra, J. and Khoirunurrofik, K. (2022) 'Understanding the role of village fund and administrative capacity in stunting reduction: Empirical evidence from Indonesia', *PLoS ONE*, 17(1 January), pp. 1–12. doi: 10.1371/journal.pone.0262743.
- Innes, J. E. and Booher, D. E. (2000) 'Indicators for sustainable communities: A strategy building on complexity theory and distributed intelligence', *Planning Theory and Practice*, 1(2), pp. 173–186. doi: 10.1080/14649350020008378.
- Ipan, I., Purnamasari, H. and Priyanti, E. (2023) 'Collaborative Governance dalam Penanganan Stunting', *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(3), p. 277. doi: 10.31258/jkp.v14i3.8308.
- Jufri, J., Usman, B. and Nofriadi, N. (2023) 'Collaborative Governance Antara Dinas Kesehatan dengan DP3AP2Kb dalam Penanggulangan Stunting di Kabupaten Gayo Lues', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP USK*, 8(3). Available at: www.jim.unsyiah.ac.id/Fisip.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (no date) *Rilis Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022*. Available at: <https://upk.kemkes.go.id/new/kementerian-kesehatan-rilis-hasil-survei-status-gizi-indonesia-ssgi-tahun-2022> (Accessed: 19 March 2024).
- Kurniasih, R. *et al.* (2022) 'Kerjasama Lintas Sektor Dalam Upaya Mencegah Stunting di RT 39 Emas Permata Sinabung', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Universitas Bengkulu*, (1), pp. 587–591. Available at: <http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JIMAKUKERTA>.
- Lima, V. (2021) 'Collaborative Governance for sustainable development', *Environmental Norms in Maritime Law*, (October). doi: 10.4337/9781839107320.00019.
- Mashar, S. A., Suhartono, S. and Budiono, B. (2021) 'Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kejadian Stunting pada Anak: Studi Literatur', *Jurnal*

- Serambi Engineering*, 6(3), pp. 2076–2084. doi: 10.32672/jse.v6i3.3119.
- Maulana, F., Silitonga, M. S. and Asropi (2023) 'Intervensi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Dalam Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting Di Desa', *Journal Publicuho*, 6(4), pp. 1393–1410. doi: 10.35817/publicuho.v6i4.281.
- Muhammad, A. S. (2017) 'Collaborative Governance Model in Managing International Borders in Riau Islands Province using Partial Least Squares Method', *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)*, 21(2), p. 166. doi: 10.22146/jkap.28097.
- Nasution, N. F. and Trimurni, F. (2024) 'Government Collaboration in Stunting Prevention Programme in Medan City', *Formosa Journal of Multidisciplinary Research*, 3(1), pp. 23–34. doi: 10.55927/fjmr.v3i1.7518.
- Nurhaeni, H. et al. (2021) 'Kolaborasi Penanganan Stunting', *Jurnal Health Sains*, 2(5), pp. 598–603. doi: 10.46799/jhs.v2i5.158.
- Permatasari, Ane and Walinegoro, B. G. (2023) 'Collaborative Governance in Realizing Smart Society as a Sustainable Stunting Reduction Efford in Sleman Regency', *E3S Web of Conferences* 440. EDP Sciences. doi: 10.1051/e3sconf/202344001010.
- Permatasari, A and Walinegoro, B. G. (2023) 'Tata Kelola Kolaboratif dalam Mewujudkan Smart Society sebagai Upaya Berkelanjutan Penurunan Stunting', *The Journal Publishing*. Available at: <http://thejournalish.com/ojs/index.php/books/article/view/495>.
- Peters, B. G. (2018) 'The challenge of policy coordination', *Policy Design and Practice*, 1(1), pp. 1–11. doi: 10.1080/25741292.2018.1437946.
- Prabasari, M. A. D., Lubis, D. S. and Sutiari, N. K. (2021) 'Community participation in the utilization of village fund for stunting prevention: Case study in two villages in Gianyar District', *Public Health and Preventive Medicine Archive*, 9(2), pp. 100–107. doi: 10.15562/phpma.v9i2.293.
- Putra, I. W. and Helmi, R. F. (2024) 'Peran Dinas Kesehatan Dalam Upaya Penanggulangan Stunting di Kabupaten Pasaman Barat', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8, pp. 8815–8822.
- Sahroji, Q. N., Hidayat, R. and Nababan, R. (2022) 'Implementasi Kebijakan Dinas Kesehatan Dalam Penanganan Stunting Di Kabupaten Karawang', *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 7(1). doi: 10.36982/JPG.V7I1.1983.
- Saputri, R. A. and Tumangger, J. (2019) 'Hulu-Hilir Penanggulangan Stunting Di Indonesia', *Journal of Political Issues*, 1(1), pp. 1–9. doi: 10.33019/jpi.v1i1.2.
- Saufi, A. (2021) 'Dinamika Collaborative Governance dalam Penanggulangan Stunting Ditengah Pandemi Covid-19', *Prosiding Seminar Nasional Penanggulangan Kemiskinan*, 1(1), pp. 80–95. Available at: <https://conference.trunojoyo.ac.id/pub/semnaspk/article/view/40/47>.

- Seaton, C. L. et al. (2018) 'Factors That Impact the Success of Interorganizational Health Promotion Collaborations: A Scoping Review', *American Journal of Health Promotion*, 32(4), pp. 1095–1109. doi: 10.1177/0890117117710875.
- Sulaiman, A. et al. (2022) 'Penerapan Collaborative Governance pada Orang Tua tentang Stunting di Posyandu Puskesmas Sawah Baru Ciputat Kota Tangerang Selatan', *Jurnal Locus: Penelitian dan Pengabdian*, 2(12), pp. 1234–1240. doi: 10.58344/locus.v2i12.2321.
- Suratman, J. A. M., Damayanti, N. A. and Azzahla, W. T. (2023) 'Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Praktik Kolaborasi Interprofesi Dan Lintas Sektor Dalam Intervensi Prioritas Penurunan Stunting Di Wilayah Puskesmas Ujungpangkah', *Jurnal Ners*, 7(2), pp. 858–863. doi: 10.31004/jn.v7i2.14510.
- Svefors, P. et al. (2020) 'Stunting, recovery from stunting and puberty development in the MINIMat cohort, Bangladesh', *Acta Paediatrica, International Journal of Paediatrics*, 109(1), pp. 122–133. doi: 10.1111/apa.14929.
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia (2018) 'Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting 2018-2024'. Available at: [https://www.tnp2k.go.id/filemanager/files/Rakornis 2018/Sesi 1_01_RakorStuntingTNP2K_Stranas_22Nov2018.pdf](https://www.tnp2k.go.id/filemanager/files/Rakornis%202018/Sesi%201_01_RakorStuntingTNP2K_Stranas_22Nov2018.pdf) (Accessed: 19 March 2024).
- Van Tulder, R. and Keen, N. (2018) 'Capturing Collaborative Challenges Designing Complexity-Sensitive.pdf', *Journal of Business Ethics*, (150), pp. 315–332. doi: <https://doi.org/10.1007/s10551-018-3857-7>.
- Ulfah, I. F. and Nugroho, A. B. (2020) 'Menilik Tantangan Pembangunan Kesehatan di Indonesia: Faktor Penyebab Stunting di Kabupaten Jember', *JURNAL SOSIAL POLITIK*, 6(2), pp. 201–213. doi: 10.22219/sospol.v6i2.12899.
- Utomo, H. S., Khaerani, T. R. and Anzalna, Y. (2023) 'Cross-Sector Collaboration in Intervention to Prevent and Reduce Stunting in Penajam Paser Utara District', *JED (Jurnal Etika Demokrasi)*, 8(2), pp. 234–244. doi: 10.26618/jed.v.
- Waliyudin, M. F., Ningsih, I. W. and Susanti, E. (2022) 'Koordinasi Dalam Upaya Percepatan Penurunan Dan Pencegahan Stunting Di Kabupaten Kuningan KUNINGAN REGENCY IS INCLUDED IN ONE OF THE REGENCIES IN INDONESIA WITH A HIGH PREVALENCE OF Isu stunting termasuk ke dalam permasalahan global dan nasional di mana b', *Jurnal Administrasi Negara*, 14(1), pp. 404–410.
- Widyowati, R. and Utomo, I. H. (2023) 'Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif Dalam Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Wonogiri', *Jurnal*

Mahasiswa Wacana Publik, 3(2007), pp. 278–296. Available at: <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/106975/>.

Yunifar, A. T., Kusbandrijo, B. and Puspaningtyas, A. (2023) 'Collaborative Governance pada Penerapan Perwali No 79 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kota Surabaya', *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 4(1), pp. 88–100.